



Analisis Anggaran Sebagai Kebijakan Salah Satu Alat Pengendalian Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan

Muhammad Dhio Natama Harahap

Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

dhioharahap172@gmail.com

Saparuddin Siregar

Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

saparuddin.siregar@uinsu.ac.id

Abstract.

This study aims to determine the budget as one of the performance control tools at the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) of North Sumatra Province, Medan City. The data collection techniques used were interviews and documentation. The types of data used are quantitative data and qualitative data. The source of data used in this study is secondary data, in the form of Regional Budget Realization Reports. The analysis method used is a comparative descriptive analysis method, namely by comparing the budget with realization in various sources of financing using variance analysis. The results showed that there were irregularities in excess funds of 68.41%, 69.96%, 99.20%, and 32.52% in the budget of BPKAD Medan City for 2022. The conclusion from the analysis and realization of expenditures is that in the 2022 fiscal year, the BPKAD Medan City experienced deviations. Where deviations occur due to the budget that is not absorbed in the budget and expenditure realization. Performance control at the Medan City BPKAD for 2022 is considered good because the budget is greater than the realization in terms of budget variance and expenditure realization variance.

Keywords: Budget, Spending, Performance Control

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anggaran sebagai salah satu alat pengendalian kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis *deskriptif komparatif*, yaitu dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi pada berbagai sumber pembiayaan dengan menggunakan analisis varians. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan kelebihan dana sebesar 68,41%, 69,96%, 99,20%, dan 32,52% pada anggaran belanja BPKAD Kota Medan untuk tahun 2022. Kesimpulan dari analisis dan realisasi belanja yaitu pada tahun anggaran 2022 BPKAD Kota Medan mengalami penyimpangan. Dimana penyimpangan yang terjadi dikarenakan adanya anggaran yang tidak terserap pada anggaran belanja dan realisasi belanja. Pengendalian kinerja pada BPKAD Kota Medan untuk tahun 2022 dinilai baik karena anggaran lebih besar dibanding realisasinya ditinjau dari varians (selisih) anggaran belanja dan varians (selisih) realisasi belanja

Kata Kunci: Anggaran, Belanja, Pengendalian Kinerja

PENDAHULUAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang Pemerintahan Daerah dalam hal pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Penatausahaan Barang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BPKAD Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu entitas pemerintah kota medan yang berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sekaligus sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang merupakan unsur teknis pemerintah kota medan. Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) BPKAD memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periodepelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa belanja yang terealisasi lebih kecil yang dianggarkan. Dimana jumlah belanja yang dianggarkan yakni Rp. 12.649.625.563.716,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.690.836.477.741,21. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan anggaran yang cukup materil.

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPKAD Tahun 2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Keterangan
2022	Rp. 12.649.625.563. 716,00	Rp. 3.690.836.477.74 1,21	Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan anggaran yang cukup materil. Dimana pada tahun 2022 menunjukkan bahwa belanja yang terealisasi lebih kecil yang dianggarkan.

Hal yang melatar belakanginya adanya anggaran yang tidak terserap dan juga terdapat kendala-kendala yaitu salah satu kendalanya adanya kegiatan yang petunjuk tekniknya terlambat turun karena tidak sempat dilaksanakan dan adanya proyek pembangunan yang berlanjut dari tahun penganggaran tidak sempat dilaksanakan tetapi dapat dilaksanakan kembali ke tahun berikutnya.

Perlunya suatu anggaran oleh manajemen adalah untuk dapat menjabarkan perencanaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi dan sebagai pedoman kerja sistematis, selain itu juga untuk mengetahui penyimpangan- penyimpangan yang terjadi dan yang

terpenting untuk meningkatkan tanggungjawab dari masing-masing karyawan atas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul "Analisis Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Pengendalian Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan".

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESISI

Pengertian Akuntansi

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan cara yang signifikan dan dinyatakan dalam nilai uang atas transaksi dan peristiwa yang setidaknya berkarakter keuangan dan menafsirkan hasilnya.

Menurut Kieso, dkk (2010), akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri atas tiga aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian. Dalam proses identifikasi ini, terjadi proses pengumpulan dan pemilahan bukti-bukti dari aktivitas ekonomi yang relevan.

Menurut Giri (2017:3), menyatakan bahwa "Akuntansi adalah sebagai suatu proses, akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, peringkasan, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang aktivitas suatu entitas bisnis kepada pihak-pihak yang berkepentingan".

Pengertian Anggaran

Menurut Andriana (2008:1) "Anggaran adalah rencana aktivitas bisnis jangka pendek, yang biasanya 12 bulan meliputi pengordinasian secara rinci rencana perusahaan yang diharapkan selama periode yang dianggarkan".

Menurut Nafarin (2009:12) "Anggaran sebagai suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk financial, sedangkan penganggagan adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo (2009:61)).

Menurut Halim (2007:164) "Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu satu tahun".

Karakteristik Anggaran

Menurut Mulyadi (2015), mengemukakan ada beberapa karakteristik anggaran antara lain:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan lainnya.
2. Umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atas kesanggupan manajemen, yang berartibahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab anggaran.
4. Proposal anggaran disahkan oleh pihak yang berwenang dalam menetapkan anggaran.
5. Setelah disahkan, anggaran hanya dapat direvisi dalam keadaan tertentu.

Macam-Macam Anggaran

Anggaran yang digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi banyak macamnya tergantung dari segi mana kita melihatnya. Anggaran digolongkan ke beberapa macam dengan tujuan untuk memudahkan dalam menyusun macamanggaran yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran meliputi tiga kegunaan pokok (Rosmaida Tambunan, 2020) :

1. Fungsi Perencanaan.
2. Fungsi Koordinasi.
3. Fungsi Pengawasan.

Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Sumarsan (2010:81) mendefinisikan akuntansi pertanggungjawaban sebagai setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan dalam unit kerjanya.

Simamora (2012:51) menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah bentuk akuntansi khusus yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja keuangan segmen bisnis yang mensyaratkan setiap manajer berpartisipasi dalam penyusunan rencana finansial untuk menyediakan laporan kinerja tepat waktu. Sedangkan, Hansen dan Mowen (2009:229) mengemukakan akuntansi pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui empat elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan mempengaruhi perilaku dalam cara

tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama.

Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban

Pusat pertanggungjawaban melakukan kegiatan untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang disebut objektive. Organisasi secara keseluruhan mempunyai tujuan, pimpinan senior menetapkan strategi untuk mencapai tujuan. Objective berbagai pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi membantu implementasi strategi. Karena organisasi merupakan sekumpulan pusatpertanggungjawaban, maka apabila setiap pusat pertanggungjawaban mencapai objektifnya, maka goal organisasi akan tercapai.

Konsep Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban

Sistem akuntansi pertanggungjawaban menghubungkan informasi akuntansi manajemen dengan wewenang yang dimiliki oleh kepala bagian. Pendelegasian wewenang ini menurut pimpinan bahwa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada pimpinan atasnya. Untuk dapat dimintai pertanggungjawabkan, pimpinan tingkat bawah harus mengetahui dengan jelas wewenang apa yang didelegasikan kepadanya oleh pimpinan di atasnya.

Pengertian Pusat Pertanggungjawaban

Menurut Kautsar Riza Salman (2016 : 111), “Pusat pertanggung jawaban adalah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan oleh unit organisasi yang dipimpinnya”.

Hubungan Anggaran dengan Akuntansi Pertanggungjawaban

Anggaran menurut Mulyadi dalam buku “Akuntansi Manajemen” (2015:165) dapat memberikan tiga fungsi pokok pada pimpinan suatu pusat pertanggungjawaban, yaitu: (1) menyatakan beberapa kebutuhan keuangan (biaya) perekonomian pada periode tertentu, (2) menjadi dasar untuk mengambil tindakankoreksi saat jumlah dianggarkan tidak sama dengan jumlah realisasi sesungguhnya, (3) anggaran dapat juga menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dimana anggaran menyediakan tolak ukur untuk mengevaluasi pimpinan yang bertanggungjawab melaksanakan anggaran tersebut dan mengontrolnya.

Hubungan Anggaran dengan Pengendalian

Manusia membutuhkan adanya suatu pengendalian dalam kehidupannya atas apa yang sedang dilakukan maupun yang telah dilakukan. Adanya pengendalian juga dibutuhkan oleh

suatu daerah untuk menjalankan kegiatan perekonomian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan-laporan yang menerangkan hasil dari aplikasi konsep akuntansi pertanggungjawaban yang memegang peranan penting dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan pengawasan atas jalannya operasi perekonomian. Isi laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Laporan pertanggungjawaban harus mencantumkan semua biaya yang sesungguhnya dikeluarkan disertai dengan jumlah biaya yang dianggarkan.

Analisis Varians

Penilaian kinerja anggaran pada umumnya menggunakan analisis selisih (varians) anggaran. Mahmudi (2013:66) menjelaskan bahwa analisis varians dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih terjadi antara anggaran dengan realisasi. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu selisih menguntungkan (*favourable*) dan tidak menguntungkan (*unfavorable*).

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Deskriptif Komparatif yaitu dengan membandingkan antara anggaran dengan realisasi pada berbagai sumber pembiayaan dengan menggunakan analisis varians. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut: Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka berupa laporan, memberi penjelasan kegiatan operasional pemerintah dan laporan keuangan. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi dan penjelasan dari pihak instansi yang berkompeten seperti gambaran umum instansi dan informasi lainnya.

Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Pengendalian Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jl. Imam Bonjol No. 18 Lt. 7 Gedung Bank Sumut, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian adalah :

1. Wawancara dengan pimpinan dan staf yang berkompeten seputar kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi objek penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu mengambil data-data yang telah di dokumentasikan oleh pihak instansi sebagai data tambahan dalam pelaksanaan penelitian ini.
3. Interview, yaitu dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik analisis varians yaitu analisis yang dilakukan terhadap perbedaan biaya yang terjadi antara anggaran dan biaya yang sesungguhnya terjadi dan ditelusuri komponen penyebab terjadinya perbedaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data anggaran belanja dan realisasi belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan tahun anggaran 2022 menurut bapak Muhammad Faisal, S.E dinyatakan bahwa *“anggaran belanja dan realisasi belanja tahun 2022 mengalami peningkatan, karena dalam satu tahun anggaran yang akan dijabarkan ke dalam bentuk program kegiatan yang dituangkan dalam laporan realisasi anggaran, maka otomatis dari nilai potensi pendapatan dibidang anggaran akan memproyeksikan menyusun rencana program kegiatan dalam bentuk belanja sumber pendapatan itu”*.

Anggaran belanja dan realisasi belanja meningkat dilihat dari berapa yang terealisasi dari anggaran yang dianggarkan setiap dines. Tetapi dalam satu tahun anggaran terdapat adanya anggaran yang tidak terserap yaitu bahwa anggaran yang tidak terserap itu karena terjadinya penyimpangan anggaran belanja dan realisasi belanja, bahwa anggaran yang tidak terserap itu akan dianggarkan di tahun berikutnya dan juga terdapat beberapa kendala teknik dilapangan sehingga tidak terserap yaitu salah satu kendalanya adanya kegiatan yang petunjuk tekniknya terlambat turun karena tidak sempat dilaksanakan tetapi dapat dilaksanakan kembali ke tahun berikutnya.

Penyimpangan tersebut diperoleh dari hasil persentase realisasi belanja dengan anggaran belanja yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Penyimpangan} = \frac{\text{Selisih Lebih/Kurang}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.1. Sedangkan hasil perhitungan analisis varians Anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dapat dilihat pada Tabel 1.2. Perhitungan analisis varians dilakukan terhadap empat kategori belanja yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Belanja Transfer.

**Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2022.**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 16 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

URAIAN	REFF.	APBD 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021 (Audited)
PENDAPATAN – LRA	4	12.011.625.563.716,00	5.108.231.923.907,84	42,53	14.034.036.626.478,60
PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA	4,1	6.819.012.313.316,00	3.006.812.037.506,84	44,09	6.402.714.086.506,57
Pajak Daerah	4.1.1	6.227.774.043.083,00	2.602.443.358.502,00	41,79	5.730.574.818.536,00
Retribusi Daerah	4.1.2	68.415.527.040,00	9.964.218.985,00	14,56	27.129.155.454,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.3	354.759.991.476,00	270.036.920.448,00	76,12	384.479.882.887,00
Lain-lain PAD yang Sah	4.1.4	168.062.751.717,00	124.367.539.571,84	74,00	260.530.229.629,57
PENDAPATAN TRANSFER	4,2	5.093.345.250.400,00	2.084.687.748.947,00	40,93	7.518.180.471.987,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.2.1	5.093.345.250.400,00	2.084.687.748.947,00	40,93	7.518.180.471.987,00
Dana Perimbangan	4.2.1.1	5.093.345.250.400,00	2.084.687.748.947,00	40,93	7.518.180.471.987,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4,3	99.268.000.000,00	16.732.137.454,00	16,86	113.142.067.985,00
Pendapatan Hibah	4.3.1	74.268.000.000,00	5.092.962.585,00	6,86	70.624.665.645,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.3.3	25.000.000.000,00	11.639.174.869,00	46,56	42.517.402.340,00
BELANJA	5	12.649.625.563.716,00	3.690.836.477.741,21	29,18	13.225.393.166.670,30
BELANJA OPERASI	5,1	7.649.152.169.985,00	2.416.122.947.637,76	31,59	9.509.003.885.719,46
Belanja Pegawai	5.1.1	3.389.494.648.546,00	1.322.969.532.583,00	39,03	3.372.531.926.884,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2	2.528.763.172.846,00	565.067.183.073,76	22,35	2.828.790.517.550,80
Belanja Hibah	5.1.5	1.695.551.376.043,00	527.124.871.861,00	31,09	3.285.226.861.027,66
Belanja Bantuan Sosial	5.1.6	35.342.972.550,00	961.360.120,00	2,72	22.454.580.257,00
BELANJA MODAL	5,2	1.952.878.620.037,00	76.463.214.262,45	3,92	1.141.203.699.701,86
Belanja Modal Tanah	5.2.1	254.994.921.040,00	0,00	0,00	29.415.668.114,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.2	310.077.982.759,00	19.970.547.031,00	6,44	322.381.442.941,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.3	432.992.536.209,00	2.090.803.412,45	0,48	169.305.548.746,79
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.4	949.091.014.868,00	53.550.115.515,00	5,64	517.043.457.513,48
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.5	5.722.165.161,00	851.748.304,00	14,89	103.057.582.386,49
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,3	45.700.753.548,00	362.680.625,00	0,79	805.581.714,00
Belanja Tidak Terduga	5.3.1	45.700.753.548,00	362.680.625,00	0,79	805.581.714,00
BELANJA TRANSFER	5,4	3.001.894.020.146,00	1.197.887.635.216,00	39,90	2.574.379.999.535,00
Belanja Bagi Hasil	5.4.1	2.588.009.792.626,00	1.197.887.635.216,00	46,29	2.574.379.999.535,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.4.2	413.884.227.520,00	0,00	0,00	
SURPLUS/DEFISIT		-638.000.000.000,00	1.417.395.446.166,63	-222,16	808.643.459.808,25
PEMBIAYAAN	6				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6,1	750.000.000.000,00	1.097.493.514.239,44	146,33	499.350.054.431,19
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.1.1	750.000.000.000,00	1.097.493.514.239,44	146,33	499.350.054.431,19
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6,2	112.000.000.000,00	104.500.000.000,00	93,30	210.500.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	6.2.2	112.000.000.000,00	104.500.000.000,00	93,30	210.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		638.000.000.000,00	992.993.514.239,44	155,64	288.850.054.431,19
SILPA		0,00	2.410.388.960.406,07	0,00	1.097.493.514.239,44

Tabel 1.2 Perhitungan Analisis Varians Anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Analisis Varians	Penyimpangan %	F/U
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	Rp 3.389.494.648.546,00	Rp 1.322.969.532.583,00	Rp 2.066.525.115.963,00	60,9685316	Favorable
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.528.763.172.846,00	Rp 565.067.183.073,76	Rp 1.963.695.989.772,24	77,65440476	Favorable
Belanja Hibah	Rp 1.695.551.376.043,00	Rp 527.124.871.861,00	Rp 1.168.426.504.182,00	68,91130052	Favorable
Belanja Bantuan Sosial	Rp 35.342.972.550,00	Rp 961.360.120,00	Rp 34.381.612.430,00	97,27991153	Favorable
Jumlah	Rp 7.649.152.169.985,00	Rp 2.416.122.947.637,76	Rp 5.233.029.222.347,24	68,41319281	Favorable
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	Rp 254.994.921.040,00	Rp -	-Rp 254.994.921.040,00	0	Unfavorable
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 310.077.982.759,00	Rp 19.970.547.031,00	Rp 290.107.435.728,00	93,55950821	Favorable
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 432.992.536.209,00	Rp 2.090.803.412,45	Rp 430.901.732.796,55	99,51712715	Favorable
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 949.091.014.868,00	Rp 53.550.115.515,00	Rp 895.540.899.353,00	94,35774708	Favorable
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 5.722.165.161,00	Rp 851.748.304,00	Rp 4.870.416.857,00	85,11492975	Favorable
Jumlah	Rp 1.952.878.620.037,00	Rp 76.463.214.262,45	Rp 1.366.425.563.694,55	69,96981531	Favorable
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	Rp 45.700.753.548,00	Rp 362.680.625,00	Rp 45.338.072.923,00	99,20640121	Favorable
Jumlah	Rp 45.700.753.548,00	Rp 362.680.625,00	Rp 45.338.072.923,00	99,20640121	Favorable
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil	Rp 2.588.009.792.626,00	Rp 1.197.887.635.216,00	Rp 1.390.122.157.410,00	53,71394503	Favorable
Belanja Bantuan Keuangan	Rp 413.884.227.520,00	Rp -	-Rp 413.884.227.520,00	0	Unfavorable
Jumlah	Rp 3.001.894.020.146,00	Rp 1.197.887.635.216,00	Rp 976.237.929.890,00	32,52073269	Favorable
Total Belanja	Rp 12.649.625.563.716,00	Rp 3.690.836.477.741,21	Rp 8.958.789.085.974,79	70,82256341	Favorable

1. Belanja Operasi

Hasil perhitungan analisis varians yang dilakukan pada belanja operasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan komponen belanja operasi menghasilkan penyimpangan yaitu selisih kelebihan dana sebesar 68,41% dengan selisih Rp. 5.233.029.222.347,24. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa anggaran belanja operasi tidak dapat terserap secara penuh. Dalam anggaran belanja dan realisasi belanja pada belanja operasi bahwa anggaran yang tidak terserap itu dikarenakan terdapatnya sejumlah kegiatan kerja dan program kerja yang sebelumnya telah dianggarkan namun tidak sempat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Dan juga di dalam perhitungan analisis varians bahwa anggaran yang dikeluarkan lebih besar dari pada realisasinya.

2. Belanja Modal

Hasil perhitungan analisis varians yang dilakukan pada belanja modal menunjukkan bahwa secara keseluruhan komponen belanja modal menghasilkan penyimpangan yaitu selisih kelebihan dana sebesar 69,96% dengan selisih Rp. 1.366.425.563.694,55. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa anggaran belanja modal tidak dapat terserap secara penuh.

3. Belanja Tidak Terduga

Hasil perhitungan analisis varians yang dilakukan pada belanja tidak terduga menunjukkan bahwa secara keseluruhan komponen belanja tidak terduga menghasilkan penyimpangan yaitu selisih kelebihan dana sebesar 99,20% dengan selisih Rp. 45.338.072.923,00. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa anggaran belanja tidak terduga tidak dapat terserap secara penuh. Dikarenakan tidak banyaknya pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4. Belanja Transfer

Hasil perhitungan analisis varians yang dilakukan pada belanja transfer menunjukkan bahwa secara keseluruhan komponen belanja transfer menghasilkan penyimpangan yaitu selisih kelebihan dana sebesar 32,52% dengan selisih Rp. 976.237.929.890,00. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa anggaran belanja transfer tidak dapat terserap secara penuh.

Pembahasan

Berdasarkan data dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa anggaran belanja dan realisasi belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (BPKAD) tahun anggaran 2022 menunjukkan bahwa anggaran belanja pada belanja modal tidak dapat terserap secara penuh. Sehingga mengalami penyimpangan yang disebabkan terdapatnya jumlah kegiatan kerja dan program kerja yang sebelumnya telah dianggarkan namun tidak sempat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Pada anggaran belanja dan realisasi belanja pada belanja modal dapat diketahui bahwa anggaran belanja modal tidak terserap secara penuh karena terdapat selisih kelebihan dana atas penganggaran terhadap belanja modal, dimana total anggaran lebih besar dari pada realisasinya. Anggaran belanja dan realisasi belanja pada belanja tidak terduga dapat diketahui bahwa anggaran belanja tidak terduga tidak terserap secara penuh karena tidak banyaknya pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sedangkan pada anggaran belanja dan realisasi belanja pada belanja transfer dapat diketahui bahwa anggaran belanja transfer tidak terserap secara penuh karena terdapat selisih kelebihan dana atas penganggaran terhadap belanja transfer, dimana total anggaran lebih besar dari pada realisasinya.

Sehingga hasil analisis varians terhadap belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer menunjukkan bahwa secara keseluruhan total anggaran belanja mengalami penyimpangan kekurangan dana sebesar 70,82% dengan selisih Rp. 8.958.789.085.974,79. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tahun anggaran 2022 dalam pelaksanaan program kegiatan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Belanja Transfer tidak terdapat efisiensi dalam penggunaan dana.

Penyimpangan yang terjadi terhadap anggaran belanja pada BPKAD Kota Medan sepenuhnya menunjukkan arah penyimpangan yang sama pada anggaran belanja modal, dimana penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan dana lebih dengan persentase sebesar 69,96% dengan selisih Rp. 1.366.425.563.694,55. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi penggunaan anggaran yang melebihi batasan yang telah dianggarkan. Kelebihan penggunaan dana tersebut terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan terhadap belanja modal. Penyimpangan kelebihan dana yang terjadi pada akhir periode sebelum penutupan buku harus diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah agar dikembalikan ke dalam kas daerah. Sedangkan untuk penyimpangan kekurangan dana BPKAD Kota Medan harus mengajukan perubahan kegiatan anggaran tersebut ke dewan pengawas guna memperoleh persetujuan biaya yang terjadi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (BPKAD) tahun anggaran 2022 pada pengendalian kinerja dinilai baik karena anggaran lebih besar di banding realisasinya ditinjau dari varians (selisih) anggaran belanja dan varians (selisih) realisasi belanja.

Menurut teori Halim dan Kusufi (2016) anggaran adalah sebagai bentuk pengendalian dan merupakan sebagai salah satu alat pengendalian kinerja. Sehingga anggaran yang dianggarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan tahun 2022 mengalami selisih anggaran pada anggaran belanja dan realisasi belanja pada anggaran belanja belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran dan realisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan tahun 2022 mengalami selisih. Dimana selisih yang terjadi dikarenakan

adanya anggaran yang mengalami selisih kelebihan dana pada anggaran belanja dan realisasi belanja pada anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (BPKAD) tahun 2022 pada pengendalian kinerja dinilai baik karena anggaran lebih besar di banding realisasinya ditinjau dari varians (selisih) anggaran belanja dan varians (selisih) realisasi belanja.

Dimana perhitungan analisis varians terhadap komponen-komponen belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer menunjukkan bahwa rata-rata komponen belanja mengalami penyimpangan antara anggaran belanja dan realisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tahun anggaran 2022 dalam pelaksanaan program kegiatan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Belanja Transfer tidak terdapat efisiensi dalam penggunaan dana.

Implikasi

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan dalam menggali potensi pengelolaan keuangan sebaiknya terus dilakukan sosialisasi, pembinaan, serta bimbingan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini dapat tercapai.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk memperkaya hasil penelitian mengenai Analisis Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Pengendalian Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya terfokus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.

Rekomendasi

1. Diharapkan BPKAD Kota Medan dapat mengoptimalkan pengelolaan dalam pelaksanaan program kegiatan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Belanja Transfer. Sehingga dapat memaksimalkan realisasi anggaran belanja daerah dan meningkatkan kembali kebutuhan daerah kota medan.
2. Diharapkan BPKAD Kota Medan dapat memaksimalkan anggaran belanja dan realisasi belanja yang tidak terserap di tahun anggaran berikutnya.
3. Diperlukan pada BPKAD Kota Medan untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran realisasi belanja untuk membiayai kegiatan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga, dan Belanja Transfer.

REFERENSI

- Andani, K. N., Sujana, E., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). *Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Moderasi*. E- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 7(1).
- Andriana, 2008, *Pemodelan Anggaran dengan Microsoft Excel* : Jakarta, Elex Media Komputindo
- Annisa, Nur Fahsrin (2019), *Analisis Anggaran Dan Realisasi Sebagai Alat Bantu Pengendalian Manajemen Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta*, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6042-Full_Text.pdf
- Fadhila, M. (2017). *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran sebagai alat Pengendalian Biaya Pada Perusahaan Minum Jayapura*, Skripsi Tidak di terbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Hasanudin: Makassar. Financial Accounting Standards Board (FASB) 2017.
- Giri, Efraim Ferdinan. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim Abdul. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriani. (2018). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Penerbit ANDI.
- Kieso, D.E., dkk. (2010). *Accounting principles (edisi ke-10)*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Korompot, R., & Poputra, A. T. (2015). *Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- Kusufi. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta
- Mulyadi. (2016). *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta
- Nurul, Dwi Andi Annisa. (2020). *Evaluasi Penyusunan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Akuntansi Kantor Walikota Makassar*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* Dan Peraturan Menteri No 13 Tahun 13 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Rosmaida Tambunan, S. M. (2020). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: PT. Rel Karir Pembelajar.

Salman, Kautsar Riza dan Mochammad Farid. (2016). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Indeks

Salman, Kautsar Riza, Anshori Muslich, and Heru Tjaraka. "New insights of Shariah Maqashid Index as determinant of tax aggressiveness level." *International Journal of Business and Management Invention* 7.6 (2018).

Simamora. 2012. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Ketiga. Star Gate Publisher Duri, Riau.

Sujawerni, W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumarsan. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. PT Indeks, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*